



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI**

KEGIATAN

MS II Tahun Sidang 2021-2022

(01 – 12 November 2021)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

DAFTAR ISI

KOMISI II	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
KOMISI III	5
A. FUNGSI LEGISLASI	5
B. FUNGSI ANGGARAN	7
C. FUNGSI PENGAWASAN	7
KOMISI IV	8
A. FUNGSI LEGISLASI	8
B. FUNGSI ANGGARAN	8
C. FUNGSI PENGAWASAN	9
KOMISI V	11
A. FUNGSI LEGISLASI	11
B. FUNGSI ANGGARAN	11
C. FUNGSI PENGAWASAN	11

KOMISI VI	15
A. FUNGSI LEGISLASI	15
B. FUNGSI ANGGARAN	15
C. FUNGSI PENGAWASAN	16
KOMISI VII	19
A. FUNGSI LEGISLASI	19
B. FUNGSI ANGGARAN	19
C. FUNGSI PENGAWASAN	19
KOMISI VIII	21
A. FUNGSI LEGISLASI	21
B. FUNGSI ANGGARAN	21
C. FUNGSI PENGAWASAN	21
KOMISI IX	24
A. FUNGSI LEGISLASI	24
B. FUNGSI ANGGARAN	24
C. FUNGSI PENGAWASAN	25
KOMISI X	29
A. FUNGSI LEGISLASI	29

B. FUNGSI ANGGARAN	30
C. FUNGSI PENGAWASAN	30
BADAN LEGISLASI	36
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN	38
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	66
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	67
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	70

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang ASN	a. Penyusunan b. Pembahasan c. <i>Harmonisasi</i> ; d. <i>Prolegnas</i> ; e. <i>Pemantauan & peninjauan</i>	Konsinering Panja RUU tentang ASN Komisi II DPR RI dengan Kementerian PAN & RB RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Kementerian Keuangan terkait membahas DIM RUU tentang ASN	Pembahasan DIM RUU tentang ASN

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Bakti 2022 - 2027	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan	1. Komisi II DPR RI meminta Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Bawaslu Masa Bakti 2022 – 2027 terkait Laporan dan Audiensi Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2021 - 2027.</p>	<p>RI Masa Bakti 2022-2027 menjamin semua proses tahapan seleksi dilaksanakan dengan prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.</p> <p>2. Komisi II DPR RI berharap momentum masa kerja Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu selama 3 (tiga) bulan ini mampu mengembalikan demokrasi ke jalan yang benar dan menghapus praktik politik uang, fenomena politik identitas dan kejahatan korupsi.</p> <p>3. Komisi II DPR RI meminta kepada Tim Seleksi agar bekerja maksimal untuk menghasilkan Calon-Calon Anggota KPU dan Bawaslu yang terbaik dengan integritas, kapasitas, kompetensi, profesionalitas,</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>kepemimpinan dan independensi yang nantinya dapat bekerja secara kolektif dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang efisien, efektif dan berkualitas.</p> <p>4. Komisi II DPR RI meminta kepada Tim Seleksi untuk melanjutkan proses tahapan seleksi dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan setiap tahapan seleksi tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p>
2.	Kementerian ATR/BPN	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p> <p>b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau</p> <p>c. Kebijakan pemerintah.</p>	Melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan PT Maskapai Perkebunan Moelia, Saudara Maderih dkk, Saudara dr Rusnawi, Sp. KK,	Permasalahan pertanahan di Medan

MS II Tahun Sidang 2021-2022
(01 – 12 November 2021)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Warga Dusun Sekotong, dan Saudara & Nainggolan & Partners terkait Pertanahan	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

1. RUU TENTANG PENYADAPAN

Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi III DPR RI tanggal 14 September 2021, bahwa sebelum melakukan Penyusunan RUU tentang Penyadapan, Komisi III DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Amerikan Serikat pada tanggal 02 s.d. 08 November 2021.

Kunjungan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi dan data baik berupa masukan maupun perbandingan mengenai pengaturan penyadapan di Amerika Serikat dari berbagai instansi atau pihak terkait sehingga mampu menjawab berbagai persoalan dan perdebatan terkait naskah yang disusun ini. Kunjungan Kerja ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam pembahasan terkait seluruh proses penyadapan yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Komisi III DPR RI melakukan pertemuan dengan beberapa pihak, yaitu:

1. *Federal Bureau of Investigation (FBI)*;
2. *Office of Enforcement Operations* yang merupakan bagian dari *Departement of Justice (DOJ)* yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual (CCIPS);
3. *New York Police Department (NYPD)*.

Dari kunjungan tersebut, Komisi III menyimpulkan ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dalam penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan, sebagai berikut:

1. Dalam hal pengaturan mekanisme permohonan aplikasi penyadapan, haruslah terdapat mekanisme permohonan izin penyadapan yang ketat dan sulit atau dengan melibatkan pihak independen. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknik penyadapan yang intrusif dan sangat rentan dengan pelanggaran hukum oleh penegak hukum, sehingga berpengaruh pada kekuatan hukum dari alat bukti yang digunakan dalam penegakan hukum.

2. Permohonan penyadapan harus diatur secara komprehensif, tegas dan terperinci dalam mekanisme dan aplikasinya, yakni setidaknya terkait mana dan siapa, jangka waktu, bagaimana penyadapan tersebut akan dilakukan, serta jangka waktu yang diberikan. Keadaan luar biasa atau mendesak tidak direkomendasikan untuk diatur, lebih baik permohonannya diatur agar tidak birokratif namun tetap ketat. Penyadapan sebaiknya diberikan izinya oleh pengadilan independen atau pihak yang memiliki otoritas tertinggi, dengan memperhatikan urgensi kebutuhan penggunaannya (seperti penggunaan *affidavit*).
3. Penyadapan haruslah dilakukan secara seimbang, sehingga membutuhkan sistem *check and balance* atau adanya kontrol dan pengawasan baik oleh internal maupun eksternal dari institusi yang berwenang. Dalam hal ini haruslah terdapat keseragaman karena pada prinsipnya bersinggungan dengan hak privasi yang dijamin dalam Konsitusi atau peraturan perundang-undangan. Aturan pengawasan ini harus bersifat mandatori.
4. Penyadapan disarankan menjadi teknik yang harus dihindari sedapat mungkin atau menjadi hal terakhir (*last resort*) bilamana seluruh upaya aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan dan jaringannya telah dilakukan sebelumnya dan terbukti tidak efektif. Hal ini karena penyadapan merupakan teknik intrusif dan bersinggungan dengan hak asasi atau hak privasi.
5. Ruang lingkup penyadapan perlu diatur secara progresif yakni untuk mencakup teknologi komunikasi yang terbaru dan bersifat progresif atau selalu berkembang (termasuk alat komunikasi dengan fitur *end-to-end encryption*).
6. Aturan mengenai hak privasi atau data pribadi juga perlu untuk diperhatikan agar tidak terjadi penyalahgunaan data dan informasi yang dapat bersifat personal atau pribadi (atau tidak bersifat publikasi). Selain itu, review atau pengawasan haruslah dilakukan secara berkala, terutama terkait dengan hasil penyadapan atau perekaman yang tidak sesuai dengan muatan perkara. Mekanisme penghapusan atau pencabutan penyadapan harus diatur secara tegas mengenai kapan, kewenangan mana saja, bersifat segera, dan menimbulkan akibat hukum atau sanksi bilamana tidak dilakukan.
7. Larangan tentang penyadapan ilegal atau penyadapan yang tidak sesuai dengan ketentuan perlu untuk diatur secara tegas agar dapat menjamin perlindungan privasi warga negara maupun jaminan prinsip kehati-hatian dalam proses penyadapan.
8. Kewajiban untuk memberikan laporan akhir atau pasca dilakukan penyadapan harus diatur untuk wajib dibuat secara lengkap, serta diberikan notifikasi pada yang bersangkutan setelahnya.

Penyusunan RUU tentang Penyadapan akan dilaksanakan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, mengingat waktu pada Masa Sidang II ini hanya 27 hari kerja (setelah dikurangi hari kunker LN dan karantina), maka pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 akan dilaksanakan kegiatan Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rapat Intern Panja	Penyempurnaan muatan materi dalam Ketentuan Umum, pengaturan sanksi administrasi, pengaturan pengelolaan kawasan konservasi dalam tindakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, serta pengaturan peran serta masyarakat.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Pertanian: 11 selon I	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Rencana Program/Kegiatan Anggaran Tahun 2022 b. Isu-Isu Aktual, Antara Lain: - Pupuk Bersubsidi - Antisipasi Perubahan Iklim - Ketersediaan Pangan - Prasarana dan Sarana Pertanian	Belum Diambil Kesimpulan Rapat
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan:	a. Pelaksanaan Undang-Undang;	a. Rencana Program/Kegiatan Anggaran Tahun 2022 b. Isu-isu Aktual, antara lain:	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	9 Eselon I	b. Pelaksanaan Keuangan Negara; d. Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Penolakan di beberapa daerah terkait PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNB - pembangunan <i>Shrimp Estate</i> - Pengembangan industri hilirisasi dalam “konsep ekonomi biru - pengembangan level UMKM usaha pengolah dan pemasar ikan - efektivitas dan evaluasi pengelolaan konservasi - Rencana aksi pengawasan sumber daya kelautan perikanan yang melibatkan partisipatif masyarakat <p>c. Penyusunan neraca komoditas perikanan dan distribusi alokasi impor</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Panja Pengawasan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	<p>Kunjungan Kerja Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani ke Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan dan diskusi antara lain dengan petani, distributor dan pengecer pupuk, serta penyuluh di Balai Penyuluh Pertanian Mojoanyar, Kec. Mojoanyar, Mojokerto, Jawa Timur 	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Kunjungan Kerja Panja Pengawasan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; d. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja Panja Pengembangan Sawit Rakyat ke Kab. Siak, Prov. Riau - Pertemuan antara lain dengan petani kelapa sawit, KUB, serta dinas terkait untuk mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan program pengembangan sawit rakyat	
3.	Kunjungan Kerja Panja Pengawasan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; e. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja Panja Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan ke Kab. Bangka, Prov, Kepulauan Bangka Belitung - Diskusi mengenai Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan di Pulau Bangka dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka Tengah, dan Direktur PT. Timah Tbk. - Kunjungan ke Lokasi Kawasan Hutan Produksi Bukit Betung Sambunggiri, Desa Jurung, Kec. Merawang, Kab. Bangka.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Rapat Panitia Kerja	Panja membahas materi DIM yang dipending yang mengatur mengenai : - Pengaturan mengenai Jalan Strategis; - Pengambilalihan Kewenangan Jalan; - Kegiatan Pembangunan Jalan Umum; - Pengusahaan Jalan Tol	Pemerintah meminta waktu untuk melakukan konsolidasi internal terkait DIM Pengusahaan Jalan Tol

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian PUPR	Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik untuk melakukan pengawasan bidang PUPR sebagai berikut:		

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		a. Kunjungan Ke Kab. Subang, Prov. Jawa Barat, untuk meninjau progres pembangunan Bendungan Sadawarna	Komisi V DPR RI mengharapkan agar pembangunan bendungan Sadawarna terkait pembebasan lahan dilakukan secara transparan sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dan pembangunan Bendungan ini dapat memberikan manfaat bagi Warga Kabupaten Subang dan kabupaten sekitarnya.	
		c. Kunjungan ke Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat untuk meninjau progres pembangunan Rumah Susun ASN;	Komisi V DPR RI mengharapkan percepatan penyelesaian pembangunan Rusun ASN tanpa mengurangi kualitas, dan perlu fasilitas pendukung seperti akses jalan, ketersediaan air	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			bersih, listrik dan PSU lainnya agar terwujud Rumah Susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman.	
		d. Kunjungan ke Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau Balai Sains Bangunan, Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, Ditjen Cipta Karya	Komisi V DPR RI meninjau kegiatan-kegiatan di Balai seperti kegiatan layanan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan pengkajian teknologi serta penilaian keandalan konstruksi bangunan agar sesuai standar yang telah ditentukan.	
2.	Kementerian Perhubungan	Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik untuk melakukan pengawasan bidang Perhubungan	Untuk memperoleh informasi dan kronologis terkait insiden tabrakan LRT beberapa waktu yang lalu dan melakukan evaluasi agar kejadian ini	

MS II Tahun Sidang 2021-2022
(01 – 12 November 2021)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			tidak terulang kembali dimasa mendatang	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU BUMN		Rapat internal	Panja Penyusunan Naskah akademik dan RUU tentang BUMN Komisi VI DPR RI telah mengadakan rapat internal dalam rangka menggali masukan seluruh anggota Panja terhadap penyusunan RUU BUMN sebagai tindak lanjut atas kegiatan RDPU dan Kunjungan Kerja yang telah dilaksanakan pada masa sidang sebelumnya. Selain itu, Panja juga menyepakati target timeline penyusunan RUU tentang BUMN yang akan disampaikan ke Badan Legislatif (Baleg DPR RI) untuk diharmonisasi.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BUMN Holding Farmasi PT Bio Farna (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Phapros Tbk	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Undang-Undang • Pelaksanaan Keuangan Negara • Kebijakan Pemerintah 	Pembahasan implementasi keputusan tarif tertinggi PCR dan antigen, serta progress vaksinasi nasional.	Komisi VI DPR RI mendesak PT. Bio Farma (Persero), PT. Kimia Farma Tbk, PT. Indofarma Tbk dan PT. Phapros Tbk untuk mengupayakan agar harga PCR dan Antigen yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Supaya dapat menggerakkan aktivitas ekonomi dibidang transportasi, akomodasi dan pariwisata serta aktivitas lainnya. Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga turut BUMN Holding Farmasi bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan kebutuhan riil jumlah vaksin yang dibutuhkan serta tepat distribusi sehingga dapat mendukung target vaksinasi

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				untuk masyarakat yang masuk kriteria wajib vaksinasi.
2.	Wakil Menteri II BUMN RI, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Undang-Undang • Pelaksanaan Keuangan Negara • Kebijakan Pemerintah 	Rapat terkait progress restrukturisasi Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	Komisi VI DPR RI mendukung upaya Pemerintah untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan mendorong Kementerian BUMN untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan pesawat maupun penunjukan lessor kepada penegak hukum dengan didahului audit investigasi. Komisi VI DPR RI memberikan jangka waktu selama 1 tahun kepada Kementerian BUMN untuk menyelesaikan restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
3.	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Undang-Undang 	Progress IPO Anak Perusahaan PT Telkom	Komisi VI DPR RI mendukung PT Telkom Indonesia (Persero)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Keuangan Negara • Kebijakan Pemerintah 	Indonesia (Persero) Tbk	Tbk dalam proses IPO PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dan mendorong Mitratel segera mendapatkan Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK sebelum proses IPO di Bursa Efek Indonesia.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Dirut Antam, Tbk., Dirut PT Vale Indonesia, Dirut PT Virtue Dragon, Dirut PT Tsinghan Steel Indonesia, dan Dirut PT Bintang Dekapan Mineral	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Proses <i>Engineering Flow</i> Diagram Mineral yang sedang di proses b. Struktur SDN yang mendukung dan struktur capital yang menyertai	-
2.	Kunjungan Kerja Luar Negeri	a. Pelaksanaan undang- undang;	ke Negara Swiss dengan agenda :	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Pertemuan dengan Kementerian Energi b. Pertemuan Duta Besar RI di Zurich c. Pertemuan dengan Barry Cellebaut	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Penanggulangan Bencana	Konsinyering	Pembahasan DIM RUU Penanggulangan Bencana terkait dengan nomenklatur kelembagaan BNPB	Bab mengenai nomenklatur kelembagaan merupakan pasal yang alot karena Pemerintah ingin menghapus nama BNPB sementara Komisi VIII DPR ingin mempertahankannya sebagaimana UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI	a. Perkembangan kebijakan mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;	a. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah membuka pintu umrah bagi jamaah haji Indonesia namun	Pembicaraan awal dengan Menteri Agama tetapi

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>b. Pembicaraan awal mengenai pembahasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M.</p>	<p>masih perlu pembahasan teknis mengenai pelaksanaannya;</p> <p>b. Kebijakan mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M belum ada, tetapi pembicaraan awal perlu dilakukan untuk mengetahui kepastian apakah aka nada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dan apakah Indonesia akan mendapat kuota haji?</p> <p>c. Pembicaraan awal mengenai BPIH Tahun 1443 H/2022 M terkait komponen penerbangan, pemondokan dan catering.</p>	<p>pembicaraan teknis dengan Dirjen PHU</p>
2.	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	<p>a. Kebijakan mengenai pengelolaan asrama haji;</p> <p>b. Manajemen asrama haji</p> <p>c. Pelayanan terhadap jamaah haji</p>	<p>Saat ini banyak asrama haji yang terbengkalai karena tidak mampu atau kekurangan dana untuk menutupi biaya operasionalnya. Padahal asrama haji hanya digunakan selama sekitar 3 bulan dalam satu tahun yakni pada masa penyelenggaraan ibadah haji</p>	<p>Selain banyak asrama haji yang tidak bisa menu-tupi biaya opera-sionalnya, juga ada beberapa asrama haji yang mangkrak</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			sedangkan sisanya selama 9 bulan tidak digunakan. Oleh sebab itu perlu inovasi dan terobosan agar asrama haji bisa mandiri alias tidak perlu lagi menggantungkan biaya operasional dan perawatan pada anggaran Kementerian Agama RI. Hal ini harus dibenahi dengan memperbaiki aspek regulasi, manajemen hingga teknis pelaksanaannya.	karena anggaran SBSN yang digunakan untuk membangunnya tidak cukup sampai tuntas.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Panja menugaskan tim asistensi untuk mempersiapkan pendalaman substansi RUU sesuai masukan anggota Panja.	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kegiatan Panja 	<ul style="list-style-type: none"> Panja akan melakukan pembahasan draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Masa Persidangan III TS 2021-2022.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian/Lembaga	Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran.	Tidak ada
2.	Badan Anggaran	a. Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga; b. Pembahasan RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.	Tidak ada

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT
1.	Tanggal 8 November 2021, Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI dan RDP dengan Ketua Satgas Covid-19, Kepala BPOM RI dan RDPU dengan Dirut PT Biofarma.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penanganan pandemi bidang kesehatan dan strategi mitigasi gelombang ketiga melalui ketersediaan obat dan alat kesehatan, ketersediaan vaksin dan vaksinasi, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta keterjangkauan akses testing dan tracing bagi masyarakat. 2. Evaluasi pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 dan rencana vaksinasi untuk anak umur di bawah 12 tahun. 3. Penjelasan mengenai kebijakan test PCR dan Antigen untuk perjalanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, Satgas Penanganan COVID-19 dan Badan POM RI untuk terus mempertahankan kondisi penanganan pandemi saat ini dengan terus meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi dalam menghadapi potensi gelombang ketiga dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Memperketat mobilitas masyarakat dengan kebijakan yang konsisten yang disertai dengan penegakan hukum yang berkeadilan; b. meningkatkan surveilans di seluruh pintu masuk negara baik darat, laut dan udara dan meningkatkan test <i>Whole Genome Sequencing</i> (WGS) yang tersedia secara merata di seluruh wilayah; c. melakukan harmonisasi kebijakan dan regulasi terkait testing dan tracing melalui pemeriksaan NAAT (q-PCR, TCM isothermal dan non-isothermal) atau antigen yang

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT
			<p>masuk ke dalam sistem <i>New All Record</i> (NAR);</p> <p>d. meningkatkan transparansi penentuan harga tes PCR yang dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat;</p> <p>e. memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk memastikan kecukupan perbekalan kesehatan untuk penanganan COVID-19.</p> <p>2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengutamakan produk dalam negeri dalam penanganan pandemi COVID-19, termasuk obat, vaksin, alat kesehatan, sepanjang telah mendapatkan <i>Emergency Use Authorization</i> (EUA) dari Badan POM RI guna meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional.</p> <p>3. Komisi IX mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan serologi survey berbasis IgG untuk dapat mengukur respon antibodi yang terbentuk pada masyarakat dengan tepat, sehingga hasilnya dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan penanganan</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT
			<p>pandemi COVID-19 ke depan, termasuk vaksinasi untuk anak dan booster.</p> <p>4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI yang didukung oleh Badan POM RI dan PT Biofarma untuk segera memfinalisasikan rencana vaksinasi COVID-19 untuk anak umur 6-11 tahun dengan mempersiapkan pembiayaan ketersediaan vaksin, mekanisme dan Standar Prosedur Operasional.</p>
2.	Tanggal 9 November sampai 11 November 2021	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait Kesiapan dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Instruksi Presiden 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Riau 2. Provinsi Jatim 3. Provinsi Sulut 	<ul style="list-style-type: none"> • Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterbitkan Pemerintah pada Tanggal 25 Maret 2021 merupakan kebijakan yang ditempuh dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja . • Dalam mewujudkan Kesiapan dan Dukungan Pemda dalam Menerapkan Inpres No. 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ini Komisi IX DPR-RI dalam Masa

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT
			<p>Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Utara.</p> <ul style="list-style-type: none">• Komisi IX DPR RI melalui kunjungan kerja spesifik ini, diharapkan mendapatkan berbagai informasi dan masukan untuk meningkatkan Kesiapan dan Dukungan Pemda dalam Menerapkan Inspres No. 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang akan datang.

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	4 November 2021 Rapat Intern Panja RUU SKN	Agenda Persiapan Rapat Panja membahas isu krusial	
2	8-10 November 2021 Konsinyasi Panja RUU SKN	Membahas isu minor RUU SKN, yang terdiri antara lain Tujuan Olahraga Nasional, Pelatih Olahraga, Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Olahraga Penyandang Disabilitas, sarana Prasarana Olahraga, Naturalisasi Atlet, Desan Besar Olahraga Nasional	Isu Minor selesai dibahas
3	4 November 2021 Rapat Intern Panja RUU Praktik Psikologi	Agenda Persiapan Rapat Panja membahas isu krusial	
4	8-10 November 2021 Konsinyasi Panja RUU Praktik Psikologi	Membahas isu krusial Pendidikan Psikologi	Substansi belum selesai dibahas.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1		<p>Rapat Intern Komisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Kerja Fungsi Pengawasan Komisi X DPR RI MS I TS 2021-2022. 2. Menyusun Rencana Kunker Spesifik dan Kunker Panja Pengawasan dan Kunker Reses Komisi X DPR RI pada MS I TS 2021-2022. 3. Lain-lain <p>(2 November 2021)</p>	<p>Menyusun agenda rapat-rapat dan kunjungan kerja pengawasan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, pariwisata, ekraf, dan perpustakaan</p>	
2	Kemendikbudristek RI	<p>RDPK KOMISI X DPR RI bersama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPRD Kabupaten Bulukumba. 2. Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKH NK 35+) Provinsi Jawa Barat. 	<p>Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Bulukumba, Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKH NK 35+) Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
		<p>3. Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNC 35+) Provinsi Jawa Timur.</p> <p>4. Perkumpulan Honorer Kategori II Indonesia (PHK2I) Korwil Jawa Tengah.</p> <p>Agenda:</p> <p>1. Menyampaikan aspirasi terkait permasalahan GTKHNC 35+ tentang regulasi PPPK dan evaluasi hasil pengumuman tes PPPK Guru tahun 2021.</p> <p>2. Permohonan konsultasi dan koordinasi terkait mekanisme penggajian PPPK.</p> <p>3. Audiensi dalam rangka penyelesaian Honorer K2 khusus Tenaga Teknis dan Administrasi pada persiapan pembukaan E-Formasi Tahun 2022.</p> <p>(2 November 2021)</p>	<p>Perkumpulan Honorer Kategori II Indonesia (PHK2I) Korwil Jawa Tengah kepada Pemerintah (Bappenas RI, Kemendikbudristek RI, Kemenag RI, KemenPAN RB RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, dan BKN RI) agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
3	Kemenparekraf/Baparekr af RI	<p>RDPU dengan DPP Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI)</p> <p>Agenda: Perkenalan dan menyampaikan aspirasi mengenai hasil pertemuan Forum Komunikasi Asosiasi Industri Pernikahan Indonesia.</p> <p>(3 November 2021)</p>	<p>Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para narasumber kepada Kemenparekraf RI agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, dan berkoordinasi dengan K/L terkait.</p>	
4	Kemenpora RI	<p>RDPU KOMISI X DPR RI bersama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantan Pengurus Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) 2. Pengurus Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan Bugar Nusantara Semesta (LSKTK BNS) <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Aspirasi Terkait Akreditasi dan Standarisasi Keolahragaan. 	<p>Komisi X DPR RI menerima masukan dari mantan Pengurus Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) dan Pengurus Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan Bugar Nusantara Semesta (LSKTK BNS) terkait standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
		2. Audiensi terkait pelaksanaan sertifikasi tenaga keolahragaan (3 November 2021)		
		RDPU Komisi X DPR RI dengan Pengurus Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI. Agenda: Masukan terhadap isu krusial/permasalahan keolahragaan (8 November 2021)	Komisi X DPR RI menerima masukan dari SIWO PWI terkait perkembangan pembinaan olahraga dan isu terkini bidang olahraga sebagai masukan pengambilan kebijakan dan penyusunan RUU SKN	
		RDPU Komisi X DPR RI dengan Pengurus Lembaga Anti Dopping Indonesia (LADI). Agenda: Membahas sanksi World Anti-Dopping Agency ke Indonesia. (8 November 2021)	Komisi X DPR RI mendesak kepengurusan LADI untuk segera melakukan koordinasi secara internal dan berbenah menjadi lebih baik dan mendorong Pemerintah untuk memperkuat keberadaan LADI sesuai amanat UU Sistem Keolahragaan Nasional	
		RDPU Komisi X DPR RI bersama Aliansi Pecinta Sepakbola	Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dan usulan yang	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
		<p>Makassar dan Aliansi Peduli Mattoanging.</p> <p>Agenda: Menerima aspirasi tentang Polemik Pembangunan Stadion Mattoangin</p> <p>(11 November 2021)</p>	<p>disampaikan Aliansi Pecinta Sepakbola Makassar dan Aliansi Peduli Mattoanging kepada Pemerintah khususnya kepada Kemenpora RI, Kemenkumham RI dan KemenPU PR RI agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan, pengelolaan prasarana dan persoalan sengketa lahan fasilitas olahraga.</p>	
		<p>RAKER BERSAMA MENPORA RI</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan PON XX Papua dan Perkembangan Peparnas XVI 2. Pembahasan Sanksi World Anti Doping Agency (WADA). <p>(11 November 2021)</p>	<p>Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora RI, Panitia Besar PON XX Papua, dan seluruh pemangku kepentingan olahraga, atas sukses yang telah diraih dalam PON XX Tahun 2021 di Papua. Komisi X DPR RI juga mengapresiasi langkah Menpora RI, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan Lembaga Anti-Doping</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
			Indonesia (LADI) yang telah membentuk Tim Akselerasi dan Investigasi dan telah melakukan percepatan penyelesaian sanksi WADA (<i>World Anti-Doping Agency</i>).	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI (BALEG)

No	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1.	Badan Legislasi	<p>1. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pengesahan jadwal acara rapat-rapat baleb Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022. (tgl 1 November 2021, pukul 13.00 WIB).</p> <p>2. Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Menkumham, MenpanRB, Mendagri, Menkeu, dan Sekretaris MA dalam rangka pembahasan 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi (tgl 1 November 2021, pukul 14.00 WIB.)</p> <p>3. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (1 November 2021, pukul 16.00 WIB).</p> <p>4. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan Pengadilan Tinggi Papua Barat (2 November 2021, pukul 13.00 WIB).</p> <p>5. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram (3 November 2021, pukul 10.00 WIB).</p>

No	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>6. Rapat Tim Perumus Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Merumuskan materi RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat (3 November 2021, pukul 14.00 WIB).</p> <p>7. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara (4 November 2021, pukul 10.00 WIB).</p> <p>8. Rapat Tim Perumus Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Merumuskan materi RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram (4 November 2021, pukul 14.00 WIB).</p> <p>9. Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Laporan Timus/Timsin terkait hasil perumusan/sinkronisasi terhadap 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi (9 November 2021, pukul 13.00 WIB).</p>

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	BKSAP - KSB	<p>1 - 6 Nov 2021</p> <p>Kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Korsel ke Korea Selatan</p> <p>Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin oleh Edward Tannur (F-PKB) dan beranggotakan Sri Wulan (F.P. Nasdem) dan Desy Ratnasari (F.PAN)</p> <p>Kunjungan ini berdasarkan undangan dari Parlemen Korsel dan bertujuan untuk penguatan kerjasama antara DPR RI dan Parlemen Korsel.</p> <p>Dalam kunjungan tersebut, selain melakukan pertemuan dengan Parlemen Korsel, delegasi juga melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian, Pangan dan Urusan Pedesaan (MAFRA), Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, dan juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Busan serta dengan KBRI Seoul.</p> <p>1. Di Parlemen Korea Selatan (Kuk Hoe), GKSB diterima oleh Wakil Ketua Parlemen, Mrs. Kim Sang-Hee</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Dalam pertemuan dengan Mrs. Kim Sang Hee dibahas berbagai hal antara lain, upaya utk peningkatan kerjasama antar parlemen, termasuk juga kerjasama antara anggota perempuan parlemen di kedua negara yg sempat tertunda karena adanya pandemi Covid 19.</p> <p>Hubungan yang baik diantara kedua parlemen telah terjalin sejak lama dan diharapkan akan terus berlanjut di masa yang akan datang.</p> <p>Dalam kunjungan ini DPR RI berkeinginan untuk mendapatkan informasi dan belajar mengenai teknologi pertanian, smart farming, dan pengelolaan lahan pertanian sehingga menjadi subur dan tidak merusak lingkungan.</p> <p>Dalam bidang kebudayaan, GKSB juga mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kedutaan Korea di Jakarta seperti baru-baru ini ada kolaborasi kesenian dimana diperagakan busana batik dan hanbok, dimana Ibu Desy Ratnasari juga berkesempatan untuk menjadi model kehormatan menggunakan hanbok.</p> <p>Dalam penanganan Covid, kerjasama antara pemerintah, parlemen dan kalangan swasta mutlak diperlukan, sehingga penyebaran Covid dapat ditekan dan dunia dapat segera terbebas dari Covid.</p> <p>Dalam berbagai kerjasama investasi yang telah dilakukan, antara lain di bidang industri pertahanan, pariwisata dan lainnya parlemen Korea meminta agar terus didukung guna meningkatkan perekonomian kedua negara.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>2. Pertemuan dengan Wakil Ketua Kelompok Persahabatan Korea – Indonesia, Mr. Park Seong-Min.</p> <p>Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Kelompok Persahabatan Korea -Indonesia, dibahas terkait mekanisme kerja di parlemen masing-masing dan juga disampaikan tentang strategi komunikasi dengan daerah pemilihan. Disampaikan bahwa Mr. Park Seong Min berasal dari wilayah Ulsan, demikian pula dengan Ketua GKSB, juga berasal dari wilayah tersebut.</p> <p>Kedua pihak sepakat bahwa kerjasama antar parlemen mutlak diperlukan untuk dapat mendorong pemerintah masing-masing dalam merealisasikan berbagai kesepakatan yang telah ada. Sebagai anggota parlemen harus bisa menjangkau konstituen sehingga terus mendapatkan dukungan untuk dapat menciptakan kebijakan sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat yang diwakilinya.</p> <p>Daerah Ulsan dikenal sebagai kota industrial dimana industry mobil dan perkapalan sangat baik dan industry perkapalan korea merupakan industry nomor 1 di dunia, untuk itu sangat terbuka peluang bagi Indonesia utk bisa belajar atau bekerjasama dalam pengembangan industry perkapalan.</p> <p>3. Pertemuan dengan Ministry of Agriculture, Foods and Rural Affairs of the Republic of Korea (MAFRA)</p> <p>Dalam pertemuan tersebut, delegasi diterima oleh Dr. Song Namgeun, Direktur Divisi Kerjasama Internasional dan jajaran MAFRA.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Disampaikan dalam pertemuan bahwa antara Korea dan Indonesia telah menandatangani MoU kerjasama di bidang Pertanian. Diharapkan dalam kunjungan ini parlemen dapat mendorong pemerintah untuk dapat terus melaksanakan berbagai kesepakatan dalam MoU tersebut.</p> <p>Untuk program ketahanan pangan, Korea berfokus pada hasil pertanian biji-bijian yang menjadi konsumsi pokok masyarakat, seperti gandum dan kacang-kacangan.</p> <p>Pemerintah Korea juga memfokuskan pendidikan kepada para petani milenial. Program tersebut dilaksanakan untuk mengajak kaum muda di korea untuk dapat menjadi petani yang baik, dengan pemberian program Pendidikan pertanian, pemberian bantuan permodalan dan juga pendampingian.</p> <p>Indonesia ingin mencontoh pelaksanaan smart agriculture dan pemanfaatan teknologi pertanian di Korea, karena lahan pertanian di Indonesia sangat luas, namun kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian masih sangat terbatas. Diharapkan ada kerjasama pertukaran informasi dan system Pendidikan petani muda.</p> <p>Hal menarik yang juga bisa dicontoh Indonesia adalah pemanfaatan lahan pertanian menjadi daya Tarik obyek wisata. Sehingga wisata pertanian dan pedesaan dapat dimanfaatkan untuk menarik turis dari manca negara. Smart farming ini menjadi destinasi wisata yang banyak diminati. Obyek wisata yang dulunya hanya ke kota-kota besar, saat ini menjadi beralih ke desa-desa. Untuk itu perlu dilakukan Pendidikan ke desa-desa agar warganya dapat menjaga desanya tetap bersih dan menarik</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>untuk memikat para turis yang datang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan para warga desa.</p> <p>Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada UMKM terdampak serta masyarakat yang terdampak pandemi antara lain dengan cara memberikan kupon untuk membeli barang kebutuhan pokok, memberikan voucher untuk petani skala kecil yang hasil panennya terdampak dan juga memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah kepada petani.</p> <p>4. Pertemuan dengan Ministry of Health and Welfare of the Republic of Korea</p> <p>Dalam pertemuan ini delegasi diterima oleh Mrs. Kyoung mee, Woo, Direktur Kerjasama Internasional, Mr. Young ki, Jeong Direktur Pencegahan dan Manajemen Penanggulangan COVID-19 dan Manajemen Bencana serta Mrs. Jung hee, Kim, Wakil Direktur Senior bidang Promosi Industri Kesehatan.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut dijelaskan terkait penanganan Covid di Korea Selatan. Korea memberlakukan 3 T, <i>Testing, Tracing dan Treatment</i> sebagaimana juga dilakukan di Indonesia. Namun di Korea tidak diberlakukan pembatasan pergerakan antar wilayah.</p> <p>Disampaikan pula bahwa pemerintah Korsel telah memberlakukan tracing secara cermat dengan menggunakan aplikasi, dimana setiap orang dari luar negeri yang masuk ke Korea juga harus mendownload aplikasi tersebut dan melaporkan kondisi kesehatannya selama berada di Korea. Pemberian vaksinasi juga sudah dilakukan kepada sebagian besar masyarakat Korea, Demikian pula</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>bagi para pekerja illegal, tetap didorong untuk melakukan vaksin. Dengan demikian angka penyebaran Covid 19 dapat ditekan.</p> <p>Per 1 November 2021, Pemerintah Koresel telah memberlakukan <i>“Live with Corona”</i>, dimana masyarakat dapat berkegiatan secara normal namun tetap memperhatikan protokol kesehatan.</p> <p>Untuk perjanjian <i>travel bubble</i>, Pemerintah Koresel telah memberlakukan secara terbatas dan baru disepakati dengan Singapura.</p> <p>Terkait dengan industri farmasi, antara kedua negara telah melakukan kerjasama dalam industri farmasi dan juga pengembangan vaksin. Diharapkan kerjasama yang ada dapat semakin meningkat dan adanya kerjasama pertukaran SDM untuk peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang ada.</p> <p>5. Pertemuan dengan Pemerintah Kota Busan</p> <p>Dalam pertemuan tersebut Delegasi diterima oleh Mr. Kim Ki-Hwan, Direktur Jenderal Kebudayaan dan Olah Raga Kota Busan.</p> <p>Disampaikan bahwa Kota Busan merupakan salah satu KotaTuris Internasional, dimana jumlah wisatawan yang berkunjung ke Korea anyak yang menjadikan Busan sebagai destinasi wisatanya, selain Seoul. Busan juga telah menjadi host dalam berbagai perhelatan sidang-sidang internasional, seperti Asia Summit 2014. Di Busan juga terdapat bandara dan pelabuhan sehingga memungkinkan berbagai kalangan untuk mengunjungi Busan.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Pemerintah Kota Busan juga telah menjalin kerjasama sister city dengan berbagai kota termasuk dengan Surabaya di Indonesia. Focus pariwisata di Busan antara lain adalah wisata kota dan wisata desa, dimana penataan kota maupun penataan desa dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat wisatawan.</p> <p>Terkait dengan desa wisata, seperti di <i>Gamcheon Culture Village</i>, pemerintah kota bekerjasama dengan masyarakat, sehingga mereka bisa menjaga desanya tetap bersih dan nyaman untuk dikunjungi.</p> <p>Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menarik wisatawan datang diantaranya adalah dengan cara membuat festival budaya berkala, membuat festival film, pertunjukan tari maupun pertunjukan kembang api. Hal lainnya, selain mengandalkan alam yang indah, juga dibangun theme park dan aquarium untuk wisata <i>indoor</i> yang tetap dapat dikunjungi sepanjang musim. Industri <i>Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)</i> termasuk yang dapat berkembang dengan baik di Busan.</p> <p>Di bidang olah raga, Busan memiliki tim baseball pria maupun wanita dan juga tim sepakbola dan pembiayaan kegiatannya bekerjasama dengan pihak swasta, yaitu Hyundai.</p> <p>Busan juga akan menjadi tuan rumah <i>World Expo 2030</i> terkait <i>Climate Change</i>. Untuk itu Busan mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Indonesia untuk bisa menjadikan Busan sebagai tuan rumah kegiatan tersebut pada waktunya.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Di Busan juga ada <i>ASEAN Culture House</i> sebagai tempat promosi pariwisata dari berbagai negara ASEAN, dimana Indonesia juga bisa ikut berpromosi disana.</p> <p>Disampaikan pula bahwa sebelumnya sudah pernah direncanakan untuk pembukaan jalur penerbangan langsung Jakarta – Busan, namun terkendala karena Pandemi.</p> <p>6. Pertemuan dengan KBRI Seoul</p> <p>Dalam pertemuan dengan KBRI Seoul, delegasi diterima oleh Kuasa Ad Interim KBRI Seoul, Ibu Zelda Wulan Kartika beserta jajaran staf KBRI. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Koordinator Kelompok Persahabatan Parlemen Korea – Indonesia, Mr. Park Seong Min yang hadir sebagai sahabat Indonesia.</p> <p>Ibu Zelda menyampaikan bahwa Duta Besar di Seoul baru saja mengakhiri masa tugasnya dan sudah kembali ke Indonesia. Disampaikan bahwa di KBRI Seoul ada 24 orang home staff dan sekitar 35 – 40 local staff, sehingga keseluruhan ada sekitar 60 orang yang bertugas di KBRI Seoul.</p> <p>Pemerintah Korea cukup aktif dalam mendorong warganya utk divaksin, bahkan untuk para pekerja migran illegal juga dihimbau utk ikut vaksin tanpa dipermasalahkan status ketenagakerjaannya. Hampir 70% masyarakat Korsel telah divaksin.</p> <p>Korea juga dikenal sebagai negara dengan teknologi yang sudah maju dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Korea juga baik, Korea juga telah membuka pabrik vaksin di Indonesia. Indonesia juga menjadi hub untuk pasar Korea di Kawasan ASEAN.</p> <p>Dalam bidang pertanian, Korsel cukup maju dengan smart farming, teknologi pertanian Korea sudah bagus dan bisa dicontoh</p> <p>Ketua GKSB menyampaikan terima kasih dan permohonan dukungan dari KBRI dalam rangkaian kegiatan GKSB ini dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, terutama dalam fungsi diplomasi parlemen. Karena mengetahui kemajuan Korsel dalam teknologi pertanian, otomotif maupun elektronik, diharapkan dalam kunjungan ini dapat meningkatkan kerjasama yang baik dengan Korea, terutama juga dengan Parlemen Korsel.</p>
	BKSAP - KSB	<p>1 November 2021</p> <p>Courtesy Call antara Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Parlemen Swiss</p> <p>Memperingati 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Swiss, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng (F-PKS) dan Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., M.B.A. (F-PDIP) secara resmi menerima kunjungan kehormatan dari Parlemen Swiss di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pagi ini (1/11/2021).</p> <p>Pertemuan membahas sejumlah hal, salah satunya terkait mulai berlakunya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Indonesia- EFTA mulai tanggal 1 November 2021, atau tepat pada hari</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>ini. Swiss menjadi satu dari empat negara anggota EFTA, dimana EFTA-CEPA adalah persetujuan ekonomi yang pertama kalinya antara Indonesia dengan negara-negara Eropa.</p> <p>Poin penting yang dibahas dalam pertemuan, yakni terkait referendum kesepakatan perdagangan bebas dengan Indonesia, yang baru-baru ini diratifikasi di Swiss. Hasil referendum menunjukkan bahwa 51,7 persen publik menyetujui kesepakatan perdagangan bebas Swiss dengan Indonesia. Wakil Ketua BKSAP mengapresiasi adanya referendum tersebut, sebab mengatur mengenai produk andalan Indonesia yaitu minyak sawit dan turunannya.</p> <p>Berdasarkan kesepakatan tersebut, nantinya seluruh tarif akan dihapus secara bertahap dari hampir semua ekspor terbesar Swiss ke Indonesia. Sementara Swiss akan menghapus bea masuk atas produk industri Indonesia. Kedepannya, investor yang mengimpor minyak sawit Indonesia harus membuktikan bahwa minyak tersebut memenuhi standar lingkungan dan sosial tertentu.</p> <p>Hadir dalam pertemuan, President of the Council of States Hon. Mr. Alex Kuprecht yang berasal dari Switzerland People's Party yang merupakan partai politik terbesar di Parlemen Swiss. Delegasi lainnya yang turut hadir dalam pertemuan antara lain, Member of the Council of States Hon. Mr. Benedikt Würth, kemudian didampingi oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia H.E. Mr. Kurt Kunz, Wakil Duta Besar (Deputy Head of Mission) Mr. Philippe Strub, serta Federal Department of Foreign Affairs Mr. Fabian Fröhlich dan Services Swiss Parliament Mr. Joachim Tomaschett.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	BKSAP - KSB	<p>2 November 2021</p> <p>Virtual Meeting antara Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Iran dengan Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Iran – Indonesia</p> <p>Ketua Grup Kerja Sama Antar Parlemen (GKSB) DPR RI - Parlemen Iran Dr. Nihayatul Wafiroh mengadakan friendly talk dengan Ketua Friendship Group Parlemen Iran Hon. Mr. Mohammad Mahdi Zahedi dan Duta Besar Iran untuk Indonesia H.E. Mr. Momammad Azad. Pertemuan yang berlangsung secara singkat tersebut, dilakukan secara virtual pada Selasa (2/11/2021).</p> <p>Sejumlah poin penting menjadi pembahasan dalam virtual meeting tersebut diantaranya peningkatan kerja sama ekonomi terutama dalam sektor ekspor-impor, sektor teknologi dan perkembangan nanoteknologi, sektor kesehatan dalam pengadaan treatment hemodialisis, dukungan terkait kemerdekaan Palestina, hingga kerja sama di bidang pendidikan dalam hal penyediaan beasiswa bagi pelajar Indonesia dan Iran.</p> <p>Sebagai informasi, nilai perdagangan Indonesia-Iran selama pandemi justru meningkat sebanyak 52 persen dari 141,6 juta dollar AS menjadi 215,9 juta dollar AS pada tahun 2020. Saat ini, Indonesia-Iran sedang merumuskan perjanjian kerja sama khusus atau Preferential Trade Agreement (PTA), sehingga perlu adanya rencana kunjungan kerja dari kedua pihak sebagai upaya agar perjanjian tersebut segera diputuskan.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	BKSAP - KSI	<p>2 November 2021</p> <p>FGD Persiapan Sidang COP 26</p> <p>Pimpinan BKSAP DPR RI Dr. Sihar Sitorus, Dr. H. Mardani Ali Sera, Ir. H. A. Hafisz Tohir, H. Andi Achmad Dara, dan Putu Supadma Rudana menghadiri Forum Group Discussion (FGD) persiapan sidang Climate change Conference of the Parties (COP 26) pada Selasa, 2 November 2021.</p> <p>Pertemuan yang berlangsung secara hybrid ini juga turut mengundang narasumber diantaranya Ketut Erawan selaku Director of Institute for Peace and Democracy, Dr. Ir. Medrilzam dan Ibu Laksmi dari BAPPENAS.</p> <p>Secara komprehensif narasumber-narasumber tersebut memberikan pemaparan terkait isu perubahan iklim yang sudah sangat memprihatinkan seperti kenaikan suhu yang ekstrim, perubahan curah hujan, kenaikan muka laut hingga gelombang ekstrim yang meningkat.</p> <p>Untuk menghindari ancaman karena perubahan iklim ini maka dibutuhkan segera aksi nyata dari negara-negara di dunia, melalui COP26 diharapkan setiap negara akan melakukan pengurangan karbon secara progresif pada tahun 2030 dan berkomitmen untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2050.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	BKSAP - KSB	<p>4 November 2021</p> <p>Courtesy Call Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia</p> <p>Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Ukraina untuk Indonesia H.E. Dr. Vasyl Hamianin, yang resmi bertugas di Jakarta mulai 30 Juli 2021 lalu. Turut hadir Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana dan Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera pada pertemuan yang digelar di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (4/11/2021).</p> <p>Pertemuan membahas sejumlah hal terkait kerja sama bilateral Indonesia-Ukraina diantaranya kerja sama di sektor pariwisata, sektor pendidikan, sektor telekomunikasi, hingga di bidang pertahanan dan alutsista. Secara spesifik, pertemuan juga membahas terkait rencana kebijakan bebas visa atau visa regime dan kerja sama perdagangan free trade agreement (CEPA) yang hingga saat ini masih dalam proses pembahasan.</p> <p>Pimpinan BKSAP menyambut baik adanya kunjungan Duta Besar Ukraina H.E. Vasyl Hamianin dan Sekretaris I Kedutaan Ukraina Ms. Svitlana Bondarenko. DPR RI berharap dengan terpilihnya duta besar baru dapat memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara dan mampu mengakselerasi peningkatan hubungan business to business (B2B) antara Indonesia dan Ukraina.</p>
	BKSAP	<p>4 November 2021</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Konsultasi Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Korpolkam</p> <p>Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) melakukan konsultasi dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), H. Lodewijk F. Paulus guna membahas program-program kerja BKSAP. Pertemuan digelar di Gedung Nusantara II DPR RI pada Kamis (4/11/2021).</p>
	BKSAP - KSI	<p>5 November 2021</p> <p>Penyampaian Pidato Ketua BKSAP DPR RI “The Role of Parliament in Climate and Nature Policy” dalam salah satu rangkaian sidang COP26</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, menyampaikan pidatonya yang bertajuk “The Role of Parliament in Climate and Nature Policy” dalam salah satu pertemuan untuk mengawali rangkaian Sidang COP26 Glasgow, pada Jumat, 5 November 2021.</p> <p>Fadli Zon menjadi narasumber atas undangan Chairs of the Environmental Audit Committee dan the Business, Energy and Industrial Strategy Committee of the House of Commons, Rt Hon Philip Dunne MP dan Darren Jones MP, serta Chair of the Environment AND Climate Change Committee of the House of Lords, Baroness Parminter.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Tujuan dari pertemuan parlemen dunia ini adalah untuk menunjukkan kontribusi yang dapat diberikan oleh pengawasan parlemen nasional terhadap kebijakan iklim dan alam nasional. Agenda ini menjadi satu-satunya acara dalam program Kepresidenan UK dan diselenggarakan oleh Parlemen Inggris.</p> <p>Dalam kesempatan ini, Dr. Fadli Zon menggarisbawahi pentingnya peran parlemen dalam pengawasan komitmen iklim nasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, mempengaruhi kebijakan iklim nasional serta meningkatkan pelibatan publik dalam debat nasional tentang perubahan iklim.</p>
	BKSAP - KSI	<p>Pemaparan oleh Ketua BKSAP DPR RI dalam sesi Advocacy COP26</p> <p>Penanganan perubahan iklim membutuhkan pelibatan multipihak baik di level global maupun nasional. Parlemen, melalui fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi, memegang peran penting dalam memastikan pelaksanaan tujuan perubahan iklim yang terkandung dalam Paris Agreement sebagai perjanjian internasional utama tentang perubahan iklim yang mengikat secara hukum.</p> <p>Pimpinan dan anggota BKSAP menjadi bagian dari anggota parlemen seluruh dunia yang berkomitmen untuk mengambil tindakan mendesak terhadap perubahan iklim di UNFCCC COP26. Para anggota parlemen berkumpul di Glasgow pada kesempatan pertemuan yang diselenggarakan IPU dan British Group of the IPU (BGIPU).</p> <p>Pada kesempatan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, menjadi narasumber di sesi Advocacy. Dalam paparannya, Ketua BKSAP menggarisbawahi mengenai ekonomi hijau, serta peran parlemen</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>dalam mendorong pemerintah mewujudkan visi penggunaan energi bersih dan mencapai Net Zero Emission.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Sihar Sitorus menyampaikan intervensi di sesi Climate Finance dengan menekankan bahwa stimulus fiskal yang saat ini lebih diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi selayaknya tidak membuat masyarakat internasional melupakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Disampaikan juga dorongan pemenuhan komitmen negara maju baik dari sisi pendanaan maupun transfer teknologi.</p> <p>Hadir pula pada kesempatan ini wakil ketua BKSAP, Mardani Ali Sera, H.A. Hafisz Thohir, Putu Supadma Rudana, serta anggota BKSAP, Andi Achmad Dara.</p> <p>Pertemuan mengadopsi dokumen yang mencakup komitmen untuk memperkuat respon terhadap ancaman perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca untuk membatasi kenaikan suhu global abad ini.</p>
	BKSAP - KSR	<p>8 November 2021</p> <p>Sidang Virtual APPF Working Group Politik</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Puteri Anetta Komarudin B.Com (F-PGolkar) dan Syahrul Aidi Maazat (FPKS), dua Anggota BKSAP DPR RI menghadiri Sidang Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) Working Group Politik yang diselenggarakan secara virtual dari Seoul, Korea Selatan pada Senin, 8 November 2021.</p> <p>Sidang APPF Working Group Politik ini membahas enam Draft Resolusi. Tiga Draft Resolusi sebagai agenda utama APPF-29 yaitu Kepemimpinan Parlemen untuk Perdamaian dan Keamanan di Asia-Pasifik dan wilayah lainnya; Penguatan multilateralisme Kawasan dan Penyelesaian Isu Berbasis Norma; dan Promosi Kerjasama yang berorientasi pada Manusia dengan Jaminan terhadap Keamanan Kemanusiaan. Sedangkan tiga Draft Resolusi tambahan yang merupakan usulan dari Korea Selatan, Jepang, dan Rusia yaitu isu tentang Semenanjung Korea; Pencapaian Denuklirisasi dan Perdamaian di Semenanjung Korea; dan Perlawanan terhadap Terorisme dan Ekstrimisme di Kawasan Asia Pasifik.</p> <p>Delegasi Indonesia mengusulkan Draft Resolusi tentang Kepemimpinan Parlemen untuk Perdamaian dan Keamanan di Asia-Pasifik dan Wilayah lainnya, sangat sepakat dengan dimasukkannya isu perubahan iklim sebagai tantangan terbesar bagi keamanan dan perdamaian internasional. Selain itu, isu rasisme, xenophobia, islamophobia dan intoleransi agama maupun nasional juga dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan. Oleh karenanya, dibutuhkan aksi mendesak di tingkat internasional maupun regional untuk menangani dampak negatif dari ancaman tersebut.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Sidang Working Group Politik ini merupakan rangkaian dari Pertemuan Tahunan ke-29 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) yang akan diselenggarakan secara hybrid di Seoul pada 13-15 Desember 2021 mendatang.</p>
	<p>BKSAP - KSR</p>	<p>8 November 2021</p> <p>Sidang Virtual APPF Working Group Women Parliamentarian Meeting</p> <p>Hj Himmatul Aliyah (FPGerindra) Anggota BKSAP DPR RI menghadiri Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) Working Group Women Parliamentarian Meeting yang diselenggarakan secara virtual dari Seoul, Korea Selatan pada Senin, 8 November 2021.</p> <p>APPF Working Group Women Parliamentarian Meeting ini membahas dua Draft Resolusi yang juga merupakan agenda utama APPF-29 yaitu tentang Mengidentifikasi cara-cara untuk memastikan respons krisis yang peka gender setelah pandemi Covid-19 yang diusulkan oleh Korea Selatan, Australia dan Vietnam. Serta Draft Resolusi yang merupakan usulan dari Korea Selatan, Kanada, Indonesia, dan Rusia yaitu isu tentang Mencapai kesetaraan Gender melalui Peningkatan Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan.</p> <p>Delegasi Indonesia yang telah mengusulkan Draft Resolusi tentang Mencapai kesetaraan Gender melalui Peningkatan Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan, mendorong negara-negara Anggota APPF untuk mengembangkan, menerapkan, dan memperkuat legislasi serta mekanisme kelembagaan yang terkait</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>dengan perlakuan yang sama, akses yang sama terhadap sumber daya, dan partisipasi yang setara untuk mempromosikan kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan sehingga perempuan dapat berpartisipasi secara setara dan bermakna di semua sektor, termasuk politik , ekonomi, masyarakat, kesehatan dan budaya, tanpa diskriminasi dan kekerasan.</p> <p>Selain itu, Hj Himmatul Aliyah juga menyampaikan mengenai pentingnya kerjasama antar anggota APPF dalam mendorong kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan baik dalam konteks nasional maupun regional.</p> <p>Working Group Women Parliamentarian Meeting ini merupakan bagian dari Pertemuan Tahunan ke-29 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) yang akan diselenggarakan di bulan Desember 2021 mendatang.</p>
	BKSAP - KSR	<p>9 November 2021</p> <p>Sidang Virtual APPF Working Group Kerjasama Regional di Kawasan Asia - Pasifik</p> <p>Ir. Effendy Sianipar (F-PDIP) Heru Widodo, S.Psi (F-PKB) dan Dr. H. Asman Abnur (F-PAN) Anggota BKSAP DPR RI menghadiri Sidang Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) Working Group Kerjasama Regional di Kawasan Asia-Pasifik yang diselenggarakan secara virtual dari Seoul, Korea Selatan pada Selasa, 9 November 2021.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Sidang APPF Working Group Kerjasama Regional ini membahas tiga Draft Resolusi yang juga merupakan agenda utama Sidang APPF-29. Pertama, Draft Resolusi tentang peran parlemen dalam menyeimbangkan antara pengendalian penyakit, ekonomi, dan hak asasi manusia, serta gagasan untuk kerja sama antar-parlemen yang diusulkan oleh Korea Selatan, dan Australia. Kedua, Draft Resolusi tentang aksi bersama parlemen dalam mengejar respons terhadap perubahan iklim dan untuk pembangunan berkelanjutan yang diusulkan oleh Korea Selatan dan Indonesia. Ketiga, Draft Resolusi tentang Meningkatkan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya di Asia-Pasifik yang merupakan usulan Korea Selatan dan Rusia.</p> <p>Delegasi Indonesia melalui usulan Draft Resolusi tentang aksi bersama parlemen dalam mengejar respons terhadap perubahan iklim dan untuk pembangunan berkelanjutan, mendorong pengarusutamaan paradigma ekonomi hijau dalam agenda pembangunan nasional serta mempercepat transisi ke energi.</p> <p>Delegasi Indonesia juga menyerukan agar parlemen menggandakan upayanya dalam mendorong masing-masing negaranya untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup aksi iklim.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Heru Widodo, Anggota delegasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menambahkan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dan lokal, serta solusi berbasis alam dan kearifan lokal dalam kebijakan dan program mitigasi perubahan iklim.</p> <p>Sidang Working Group Kerja Sama Regional di Asia - Pasifik ini merupakan rangkaian dari Pertemuan Tahunan ke-29 Asia Pacific Parliamentary Forum (AIPA) yang akan diselenggarakan secara hybrid di Seoul pada 13-15 Desember 2021 mendatang.</p>
	BKSAP - KSR	<p>9 November 2021</p> <p>Sidang Virtual APPF Working Group di Bidang Ekonomi Kawasan Asia Pasifik</p> <p>Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si (F-PDIP) dan Ratih Megasari Singkaru, M.Sc (F-PNasdem) Anggota BKSAP DPR RI menghadiri Sidang Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) Working Group Economy di Kawasan Asia-Pasifik yang diselenggarakan secara virtual dari Seoul, Korea Selatan pada Selasa, 9 November 2021.</p> <p>Sidang APPF Working Group Ekonomi ini membahas 3 Draft Resolusi yang juga merupakan agenda utama Sidang APPF-29. Pertama, Draft Resolusi penguatan kerja sama internasional untuk ketahanan ekonomi dan pemulihan ekonomi inklusif, diusulkan oleh Korea Selatan, Indonesia, dan Russia. Kedua, Draft Resolusi percepatan ekonomi digital dan peningkatan konektivitas, diusulkan Korea Selatan, Kanada, Indonesia, Vietnam, Australia, dan Filipina. Ketiga, Draft Resolusi peran parlemen dalam</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>meningkatkan integritas ekonomi dan memajukan perdagangan regional, diusulkan Korea Selatan dan Jepang.</p> <p>Delegasi Indonesia melalui usulan Draft Resolusi pertama, mendorong diperkuatnya solidaritas dan kerjasama internasional yang intensif dalam kerangka multilateral dan regional untuk menangani pandemi serta dampaknya, berdasarkan nilai inklusifitas, transparansi, keterbukaan, saling menghargai dan menguntungkan.</p> <p>Yohanis Fransiskus Lema, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan mewakili Delegasi Indonesia mendorong penuh langkah ekonomi hijau untuk mencapai pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan, pembangunan yang lebih cepat dan masyarakat yang lebih inklusif.</p> <p>Sedangkan Ratih Megasari Singkarru, M.Sc, Anggota delegasi dari Fraksi Partai Nasdem, dalam pembahasan Draft Resolusi kedua, menggarisbawahi pentingnya peran digitalisasi, inovasi dan teknologi dalam mempromosikan ketahanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terutama di masa pandemi, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan regulasi untuk memperkuat UMKM dan akselerasi konektivitas digital di kawasan.</p> <p>Sidang Working Group Kerja Sama Ekonomi di Asia - Pasifik ini merupakan rangkaian dari Pertemuan Tahunan ke-29 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) yang akan diselenggarakan secara hybrid di Seoul pada 13-15 Desember 2021 mendatang.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
	BKSAP - KSR	<p>10 November 2021</p> <p>Sidang Virtual APPF Executive Committee</p> <p>Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, MCOMM&MEDIAS (F-PDIP) dan Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M. (F-PDemokrat) Anggota BKSAP DPR RI menghadiri Sidang Komite Eksekutif Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF Executive Committee) yang diselenggarakan secara virtual dari Canberra, Australia pada Selasa, 10 November 2021.</p> <p>Sidang Komite Eksekutif membahas tentang posisi presidensi APPF, Sekretariat APPF dan amandemen Rules of Procedure. Sidang ini dihadiri oleh Australia sebagai Presiden Ad-Interim APPF, Korea Selatan sebagai host APPF, dan Indonesia, Jepang, Fiji, Thailand, Kanada, China serta Laos sebagai Anggota Komite Eksekutif yang mewakili berbagai sub regional.</p> <p>Pada akhir pertemuan, Komite Eksekutif APPF menyepakati untuk membahas kembali topik-topik ini dalam Pertemuan Tahunan ke-29 APPF yang akan diselenggarakan secara hybrid di Seoul pada 13-15 Desember 2021 mendatang.</p>
	BKSAP	<p>12 November 2021</p> <p>Pemaparan oleh Pimpinan BKSAP DPR RI dalam Kampus Merdeka</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Setelah 4 hari mendapatkan penjelasan tentang fungsi Diplomasi Parlemen di BKSAP, pada hari terakhir magang di BKSAP, para mahasiswa Kampus Merdeka menjalankan sesi sharing dan penyampaian kesan dan pesan.</p> <p>Informasi terkait berbagai kegiatan BKSAP, baik dalam sidang internasional, sidang regional maupun berbagai kegiatan kerjasama bilateral telah diperoleh para mahasiswa, yang merupakan sesuatu yang baru dimana hal tersebut tidak didapatkan di kampus. Untuk itu para mahasiswa menyampaikan apresiasi dan sangat senang memperoleh ilmu yang baru.</p> <p>Kepala Biro KSAP, Endah Retnoastuti menyampaikan kembali pentingnya pelaksanaan diplomasi parlemen oleh BKSAP DPR RI, serta berbagai penjelasan yang masih menjadi pertanyaan para mahasiswa seperti proses penetapan tema sidang di IPU maupun mekanisme kerja organisasi GOPAC.</p> <p>Dalam kesempatan ini, para mahasiswa juga bertemu dengan Pimpinan BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera dan Putu Supadma Rudana, sehingga berkesempatan menambah wawasan terkait pelaksanaan diplomasi Parlemen.</p> <p>Disampaikan oleh Putu Supadma Rudana bahwa banyak isu penting yang dibawa ketika delegasi BKSAP DPR RI bersidang di luar negeri, seperti tentang isu kedaulatan negara, perdagangan kelapa sawit, pariwisata, kerjasama ekonomi dan lain -lain.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Dr. Mardani Ali Sera juga menambahkan peran DPR RI sangat penting dalam pelaksanaan diplomasi, karena di dunia ini begitu banyak negara yang menganut system parlementer dimana parlemen memiliki peran yang sangat kuat dalam penentuan kebijakan. Dengan adanya diplomasi yang dilakukan oleh parlemen, sebagai second track diplomasi tentunya akan semakin banyak permasalahan yang bisa dicarikan jalan keluarnya.</p> <p>Untuk saat ini DPR RI juga focus kepada isu terkait climate change, yang merupakan concern kita semua, dan diharapkan dapat dicarikan jalan keluar terbaik dalam menghadapi permasalahan climate change.</p>
	BKSAP - KSB	<p>12 November 2021</p> <p>Pimpinan BKSAP DPR RI mendampingi Korpolkam dalam Courtesy Call dengan Anggota Kongres Amerika Serikat</p> <p>Delegasi Kongres Amerika Serikat yang dipimpin oleh Hon. Mr. Ami Bera diterima oleh Wakil Ketua/Korpolkam, H. Lodewijk F. Paulus didampingi oleh Putu Supadma Rudana, MBA/ Wakil Ketua BKSAP DPR RI (F-PD), Charles Honoris/ Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Amerika Serikat (F-PDIP), Dave Akbarshah Fikarno, ME/ Anggota Komisi I DPR RI (F-GOLKAR).</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Sementara itu, Delegasi Kongres AS terdiri dari Mr. Ami Bera, Mr. Juan Vargas, Mr. Derek Kilmer, Mrs. Abigail Spanberger didampingi oleh Deputy Head of Mission Kedutaan Amerika Serikat Mr. Michael Kleine.</p> <p>Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal antara lain terkait penanganan Covid, dimana pihak Kongres AS mengapresiasi Indonesia dalam penanganan Covid. DPR RI juga mengapresiasi pihak Pemerintah AS yang telah memberikan banyak bantuan kepada Indonesia dalam penanganan Covid.</p> <p>Selain itu juga dibahas terkait upaya menjaga kedamaian di Kawasan Indo Pacific, dimana Indonesia menjadi negara yang disegani di Kawasan ASEAN, sehingga dapat memainkan peran yang signifikan, apalagi Indonesia juga akan menjadi Ketua G-20 pada Desember mendatang.</p> <p>Dibahas pula terkait strategi dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, termasuk didalamnya upaya memulihkan sektor pariwisata, kerjasama di bidang kesehatan, dan juga peningkatan kerjasama di bidang pertahanan.</p> <p>Pihak AS juga mengapresiasi Indonesia dalam kemajuan demokrasinya. Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam yang terbesar, dapat menjalankan demokrasi dengan baik dan saling pengertian diantara pemeluk agama yang berbeda-beda. Diharapkan apa yang dilakukan di Indonesia ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Diharapkan dengan adanya kunjungan ini, hubungan kerjasama antar parlemen antara kedua negara dapat terus meningkat di masa yang akan datang.</p>
	BKSAP - KSR	<p>12 November 2021</p> <p>Sidang Virtual Consultative Meeting ASEP11 Drafting Committee</p> <p>Gilang Dhielafararez, S.H., LL.M (F-PDIP) Anggota BKSAP DPR RI menghadiri Consultative Meeting of the 11th Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP-11) Drafting Committee yang diselenggarakan secara virtual dari Phnom Penh, Kamboja pada Jum'at, 12 November 2021.</p> <p>Pertemuan Konsultatif ini mengkonsolidasikan berbagai masukan terhadap Draft Deklarasi ASEP11 yang hasilnya akan dibahas lebih mendalam dan diadopsi pada Sidang Pleno ke-11 ASEP pada 16 November 2021 mendatang, dan diajukan menjadi rekomendasi bagi ASEM13.</p> <p>ASEP Meeting adalah forum yang menghimpun parlemen dari negara-negara Asia Europe Meeting (ASEM) dan Parlemen Eropa guna berpartisipasi aktif dalam proses perundingan ASEM. Hasil dari ASEP Meeting akan diajukan sebagai rekomendasi dari ASEP (legislatif) kepada ASEM (eksekutif).</p> <p>Pada final Draft Deklarasi hasil dari pertemuan konsultatif ini, delegasi Indonesia berhasil mengusulkan poin-poin yang disepakati. Pembahasan mencakup antara lain berbagai tantangan dan ancaman global yang baru dan kompleks, seperti perubahan iklim dan pandemi Covid-19 sangat memerlukan solidaritas</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>global dan komitmen bersama dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Kerjasama multilateral dan kemitraan global juga menjadi sangat diperlukan untuk menyelesaikan isu-isu keamanan, stabilitas, dan pembangunan berdasarkan hukum internasional.</p>

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO	JUDUL	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Kunjungan Kerja Dalam Negeri	Mahkamah Kehormatan Dewan telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Kota Depok dalam rangka Sosialisasi Tugas dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Anggota DPR RI	
2.		Paket Meeting	Kegiatan Paket Meeting Mahkamah Kehormatan Dewan Sinergi Penegak Hukum Dalam Penyelidikan Dugaan Perkara Pelanggaran Kode Etik DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 November 2021 dan 8 – 10 November 2021 dengan mengundang narasumber dari Divisi Propam Kepolisian Republik Indonesia dan Jamwas Kejaksaan Republik Indonesia	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	Rapat Intern, 1 November 2021 Agenda: Penetapan Jadwal Kegiatan BURT MS 2 TS 2021-2022	---	
2.	Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI, 11 November 2021 Agenda: Nota Penjelasan Sekjen tentang Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan III Tahun 2021	<p>1. Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2021 sebesar Rp3.844.783.022.189,00,- atau 66,38% dari pagu sebesar Rp5.792.179.383.000,00,- (Realisasi Satker Dewan 66,83% dari pagu Rp4.226.250.874.000,00,- dan Realisasi Satker Setjen 65,15%) dari pagu Rp1.565.928.509.000,00.</p> <p>2. BURT meminta Sekjen untuk menginventarisasi seluruh kegiatan pada Satker Dewan dan Satker Setjen yang dapat digeser agar realisasi triwulan IV lebih maksimal sesuai target yang ditentukan untuk selanjutnya akan disampaikan dalam rapat panja.</p>	Pembahasan dan pendalaman dilanjutkan melalui mekanisme panja (Rapat Panja akan dilaksanakan tgl 18 November 2021)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
		<p>3. Sekjen segera menyampaikan target realisasi anggaran untuk setiap AKD, Biro, Pusat dan Inspektorat.</p>	
<p>3.</p>	<p>Rapat BURTdengan Asuransi Jasindo dan Sekretariat Jenderal DPR RI, 11 November 2021</p> <p>Agenda:</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Jasindo akan menyediakan layanan <i>hotline</i> khusus untuk membantu mempercepat pelayanan bagi Anggota DPR dan keluarga nya ketika akan berobat di rumah sakit provider. 2. Asuransi Jasindo menjamin pemeriksaan penunjang <i>Rapid</i> atau PCR dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) 12 kali per tahun untuk peserta utama b) 6 kali per tahun untuk keluarga 3. Asuransi Jasindo menempatkan <i>Personal Care Officer</i> (PCO) di rumah sakit provider yang paling banyak dikunjungi oleh Anggota DPR dan keluarga. 4. Asuransi Jasindo segera melakukan sosialisasi mengenai aplikasi <i>mobile</i> yang dapat digunakan oleh Anggota DPR dan keluarga untuk memperoleh informasi-informasi penting mengenai program Jamkestama. 	

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
		<p>5. Asuransi Jasindo secara aktif menyampaikan informasi secara berkala mengenai jadwal <i>Medical Check Up</i> kepada Anggota DPR serta menambah jumlah pertanggung <i>Medical Check Up</i>.</p> <p>6. Asuransi Jasindo akan menyediakan layanan <i>hotline</i> khusus untuk membantu mempercepat pelayanan bagi Anggota DPR dan keluarga nya ketika akan berobat di rumah sakit provider.</p>	
4.	<p>Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pelayanan keprotokolan di Bandara. 2. Pengawasan pelayanan program Jamkestama yang dilaksanakan rumah sakit provider Asuransi Jasindo 	<p>A. Kunjungan Kerja BURT dalam rangka pengawasan pelayanan keprotokolan di Bandara pada Tgl 2-4 November 2021 ke Bandara Juanda Surabaya.</p> <p>B. Kunjungan Kerja BURT dalam rangka Pengawasan pelayanan program Jamkestama yang dilaksanakan rumah sakit provider Asuransi Jasindo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tgl 8-10 November 2021 ke rumah sakit di Bandung, Jawa Barat. 2. Tgl 12-14 November ke rumah sakit di Denpasar, Bali. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Universitas Diponegoro (UNDIP) tanggal 8 s.d. 10 November 2021.	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Universitas Diponegoro dalam rangka memperoleh masukan dari civitas akademisi UNDIP atas penelaahan BAKN DPR RI dengan tema Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional.	Kunjungan Kerja
2.	Universitas <i>Universitas Gadjah Mada</i> (UGM) tanggal 11 s.d. 13 November 2021.	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke <i>Universitas Gadjah Mada</i> dalam rangka memperoleh masukan dari civitas akademisi UGM atas penelaahan BAKN DPR RI dengan tema Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional.	Kunjungan Kerja
